

**PELAKSANAAN TUGAS POKOK PENGAWAS BIMBINGAN
DAN KONSELING DALAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN
KONSELING DI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS
(Studi di Kota Pariaman Sumatera Barat)**

TESIS



Oleh

**ANAS MUNANDAR MATONDANG
NIM. 1303736**

**Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Mendapatkan Gelar Magister Pendidikan**

**PROGRAM STUDI S2 BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

ABSTRACT

Anas Munandar Matondang. 2016. "Implementation of the Main Tasks Guidance and Counseling Supervisor at Senior High School (Study in Pariaman City West Sumatra)" Thesis. Guidance and Counseling Post Graduate Program Faculty of Education, State University of Padang.

This research is motivated because supervision of Guidance and Counseling (GC) in the High Schools was not optimum. The purpose of this study was to reveal and describe the implementation of the basic tasks related to monitoring, assessment, and coaching by Supervisor to GC Teacher or Counselor.

This study used quantitative approach with descriptive methods. The samples in this research were 33 people GC Teacher or Counselor at senior high school level in city of Pariaman with total sampling technique, and 1 people GC Supervisor. The instrument used is Likert scale models. This study was conducted on January 20, 2016 by revealing perception GC Teacher or Counselor about the main tasks of Trustees GC form of monitoring, assessment, and coaching. Then do the interview to the Supervisor GC to strengthen data obtained from GC Teacher or Counselor.

Finding of this study are as follows: (1) the quality of the implementation of monitoring by the Supervisor GC into GC Teacher or Counselor in senior high school are in the enough category, and the vocational high school are in the enough category, (2) the quality of the implementation of the assessment by GC Supervisor into GC Teacher or Counselor in senior high school are in the enough category, and the vocational high school are in the enough category, and (3) the quality of the implementation guidance for GC Teacher or Counselor by supervisor in senior high school are in the enough category, while the vocational high school also in good category. Based on the findings, it can be concluded that monitoring, assessment, and coaching is still in the category enough due GC Supervisory do not understand about these materials GC supervision must be understood so that less skilled into practice. It is also due to its own Supervisors GC educational qualifications are not of minimum S1 or S2 GC. The implication of this study can be used as a reference and material evaluation of the implementation of the basic tasks of Trustees GC in high school, especially in the city of Pariaman.

Keywords: Guidance and Counseling, GC Supervisor Duty, GC Teacher or Counselor

ABSTRAK

Anas Munandar Matondang. 2016. “Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas Bimbingan dan Konseling dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Studi di Kota Pariaman Sumatera Barat)” Tesis. Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan bidang Bimbingan dan Konseling (BK) di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan dan mendeskripsikan data tentang pelaksanaan tugas pokok Pengawas bidang BK terkait dengan pemantauan, penilaian, dan pembinaan oleh Pengawas BK kepada Guru BK atau Konselor.

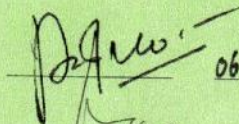

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif metode deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah Guru BK atau Konselor berjumlah 33 orang tingkat SLTA se-Kota Pariaman dengan teknik *total sampling*, dan 1 orang Pengawas BK. Instrumen yang digunakan adalah angket dengan model skala *Likert*. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Januari 2016 dengan mengungkapkan persepsi Guru BK atau Konselor tentang pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK berupa pemantauan, penilaian, dan pembinaan. Kemudian dilakukan wawancara kepada Pengawas BK untuk memperkuat data yang diperoleh dari Guru BK atau Konselor.

Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) kualitas skor pelaksanaan pemantauan terhadap kinerja Guru BK atau Konselor oleh Pengawas BK di SMA berada pada kategori cukup dan di SMK juga berada pada kategori cukup, (2) kualitas skor pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Guru BK atau Konselor oleh Pengawas BK di SMA berada pada kategori cukup dan di SMK juga masih berada pada kategori cukup, dan (3) kualitas pelaksanaan pembinaan terhadap kinerja Guru BK atau Konselor oleh Pengawas BK di SMA berada pada kategori cukup sedangkan di SMK telah berada pada kategori baik. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemantauan, penilaian, dan pembinaan yang masih berada pada kategori cukup disebabkan karena Pengawas BK tidak paham tentang materi-materi pengawasan BK yang harus dipahami sehingga kurang terampil dalam melaksanakannya. Hal ini juga disebabkan karena Pengawas BK sendiri kualifikasi pendidikannya tidak dari S2 BK atau minimal S1 BK. Implikasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK di SLTA khususnya di Kota Pariaman.

Kata Kunci : Bimbingan dan Konseling, Tugas Pengawas BK, Guru BK atau Konselor

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama Mahasiswa : *Anas Munandar Matondang*
 NIM : 1303736

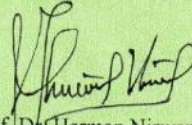
Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Prayitno, M.Sc., Ed. Pembimbing I		<u>06-08-2016</u>
Prof. Dr. Yahya Jaya, MA. Pembimbing II		<u>18-08-2016</u>



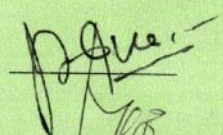

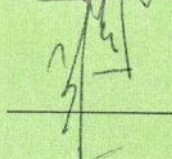
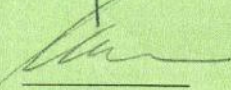
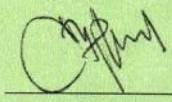
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
 Universitas Negeri Padang,

Dr. Alwen Bentri, M.Pd.
 NIP. 19610722 198602 1 002

Ketua Program Studi S2 Bimbingan dan
 Konseling FIP UNP,


Prof. Dr. Herman Nirwana, M.Pd., Kons.
 NIP. 19620405 198803 1 001

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER PENDIDIKAN**

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Prayitno, M.Sc., Ed. (Ketua)	
2.	Dr. Yahya Jaya, MA. (Sekretaris)	
3.	Prof. Dr. Sufyarma, M.Pd. (Anggota)	
4.	Dr. Marjohan, M.Pd., Kons. (Anggota)	
5.	Dr. Yeni Karneli, M.Pd., Kons. (Anggota)	

Mahasiswa :
Nama : **Anas Munandar Matondang**
NIM : 1303736
Tanggal Ujian : 14 Juni 2016

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas Bimbingan dan Konseling dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Studi di Kota Pariaman Sumatera Barat)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 18 Agustus 2016
Saya yang menyatakan,

Anas Munandar Matondang
NIM. 1303736

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling SMTA”, kemudian shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Prayitno, M.Sc., Ed selaku pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Yahya Jaya, MA. selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, ilmu dan saran untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd., Bapak Dr. Marjohan, M.Pd., Kons., dan Ibu Dr. Yeni Karneli, M.Pd., Kons., selaku penguji, kontributor sekaligus penimbang instrumen (*Judge*) yang senantiasa memberikan dukungan dan saran untuk perbaikan serta kesempurnaan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Alwen Bentri, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Prof. Dr. Herman Nirwana, M.Pd., Kons., selaku Ketua Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga membantu dalam penyelesaian penulisan hasil tesis ini.
6. Segenap karyawan Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam rangka penyelesaian penulisan tesis ini.

7. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta (H. Aswar Matondang, S.Pd., dan Hj. Agustiah Nasution, S.Pd.I), abanganda Ali Wahyudi Matondang, Amd., adik-adik (Eka Hadiannur Matondang, S.Pd.I., Arif Abdullah Mtd, dan Arfah Pratiwi Mtd) serta adinda Rofiqoh Hasibuan yang telah memberi kasih sayang, motivasi, didikan, dan do'a yang sangat luar biasa untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi S2 Bimbingan dan Konseling yang senantiasa memberikan *support* dan kontribusi berharga demi penyelesaian penulisan tesis ini.

Peneliti mendoakan semoga Allah memberikan balasan untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dengan imbalan pahala yang berlipat ganda. Peneliti menyadari bahwa penyusunan hasil penelitian ini belumlah sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak. Harapan peneliti semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, 18 Agustus 2016
Peneliti

Anas Munandar Matondang

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Pengembangan Potensi Peserta Didik	1
2. Pelayanan BK di Sekolah	2
a. Guru BK atau Konselor di Sekolah	4
b. Pengawas BK di Sekolah.....	7
3. Kondisi Lapangan.....	8
B. Masalah Penelitian	11
1. Identifikasi Masalah	11
2. Pembatasan Masalah	12
3. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat penelitian	13
a. Manfaat Teoretis	13
b. Manfaat Praktis	14

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	15
1. Kegiatan Guru BK atau Konselor di Sekolah.....	15

a. Merencanakan Program Pelayanan BK.....	17
b. Melaksanakan Program Pelayanan BK	19
c. Evaluasi Program Pelayanan BK.....	20
d. Melaksanakan Tindak Lanjut	22
2. Tugas Pokok Pengawas Bimbingan dan Konseling	23
a. Konsep Pengawasan (Supervisi).....	23
b. Supervisi Bimbingan dan Konseling	25
1) Pengertian Supervisi Bimbingan dan Konseling	25
2) Tujuan Supervisi Bimbingan dan Konseling	26
c. Tugas Pokok Pengawas Bimbingan dan Konseling	27
B. Penelitian yang Relevan	32
C. Kerangka Berpikir	35

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	39
D. Definisi Operasional	40
E. Pengembangan Instrumen.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data	49

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	52
1. Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK.....	52
a. Secara umum	53
b. Secara khusus	54
2. Perbandingan Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Berdasarkan Komponen Pengawasan.....	57
a. Tingkat SMA	57
b. Tingkat SMK.....	58

3. Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK berdasarkan item instrumen	59
4. Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Berdasarkan Responden Penelitian	61
5. Hasil Wawancara kepada Pengawas BK dan Kaitannya dengan Pengawasan kepada Guru BK atau Konselor	64
B. Pembahasan Hasil Penelitian	70
1. Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK kepada Guru BK atau Konselor	70
2. Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Berdasarkan Komponen Pengawasan	74
a. Komponen Pemantauan	74
b. Komponen Penilaian	76
c. Komponen Pembinaan	78
C. Keterbatasan Penelitian	80
 BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	
A. Kesimpulan	82
B. Implikasi	82
C. Saran	83
 DAFTAR RUJUKAN	86
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sampel Penelitian	40
2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	43
3. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Keapada Pengawas	45
4. Kategorisasi Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok pengawas BK	51
5. Distribusi Frekuensi Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK	53
6. Distribusi Frekuensi Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Tingkat SMA	54
7. Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Tingkat SMK	55
8. Perbandingan Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK.....	56
9. Perbandingan Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Berdasarkan Komponen Pengawasan SMA.....	57
10. Perbandingan Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Berdasarkan Komponen Pengawasan SMK.....	58
11. Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Berdasarkan Item Instrumen	60
12. Kualitas Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Berdasarkan Responden Penelitian	61
13. Skor Responden Berdasarkan Kualifikasi pendidikan PPK, BK, dan Non BK.....	63
14. Hasil Wawancara Kepada Pengawas BK dan Kaitannya dengan Pengawasan kepada Guru BK atau Konselor.....	64
15. Hasil Pendalaman Wawancara kepada Pengawas BK.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Instrumen Penelitian.....	90
2. Tabulasi Data Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK	104
3. Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Berdasarkan Komponen Pengawasan	107
4. Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Berdasarkan Komponen Pengawasan Tingkat SMA	109
5. Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Berdasarkan Komponen Pengawasan Tingkat SMK	111
6. Skor Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas BK Berdasarkan Item Instrumen	113
7. Pedoman Wawancara	116
8. Surat-surat	121

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Pengembangan Potensi Peserta Didik

Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan/layanan bagi seseorang atau peserta didik agar yang bersangkutan dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Adanya perasaan kecewa, tidak berdaya, tidak berguna, tertekan, dan stres merupakan beberapa kondisi yang dapat menghambat seseorang untuk berkembang secara optimal. Ada beberapa alasan perlunya kegiatan BK diselenggarakan di sekolah, hal ini dapat dilihat dari pengertian pendidikan itu sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 ayat 1) menyatakan bahwa.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan pengertian pendidikan menurut Undang-Undang tersebut dapat dilihat arah pengembangan potensi peserta didik ada enam fokus bidang pembinaan, yaitu: (a) kekuatan spiritual keagamaan, (b) pengendalian diri, (c) kepribadian, (d) kecerdasan, (e) akhlak mulia, (f) dan keterampilan.

Keenam fokus pembinaan melalui pendidikan itu berorientasi pada potensi peserta didik yang seharusnya dikembangkan secara optimal. Potensi yang dimaksudkan itu adalah potensi dasar kemanusiaan yang dapat diidentifikasi sebagai panca daya (taqwa, cipta, rasa, karsa, dan karya) dengan kelima unsurnya (kefitrahan, keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan) sebagaimana yang ada di dalam Harkat Martabat Manusia (HMM). Pengembangan panca daya itu sesungguhnya menjadi tugas pokok upaya pendidikan secara menyeluruh.

Apabila pada diri peserta didik tidak berkembang kelima daya itu maka terjadilah: keimanan dan ketaqwaan yang teringkari; kemampuan cipta atau berpikir yang lemah, tidak terarahkan, dan terbelakang; perasaan yang tidak tenang, kasar, resah, rusuh, tak terkendali; karsa atau semangat yang lemah, peragu, terbawa arus, terombang ambing, dan tidak bebas, tergantung pada pihak lain; kemampuan karya yang lemah, tidak berdaya, tidak aktif-kreatif-inovatif, tidak produktif, yang menyebabkan sengsara, dan nestapa. Inilah makna pengembangan potensi berupa pancadaya secara optimal untuk berkehidupan damai, berkembang, maju, sejahtera, dan bahagia dalam kehidupan yang berintegritas. Maka tercapailah kondisi 5-AS, yaitu perilaku yang cerdas, terkemas, mawas, tangkas, dan tuntas (Prayitno, 2013:50)

Prayitno (2014:80) menjelaskan bahwa pengembangan tersebut tentunya dilaksanakan dengan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung yang merupakan tugas pokok Guru BK atau Konselor di sekolah, sehingga terwujudlah Kehidupan Efektif Sehari-hari (KES) dan terhindar dari Kehidupan Efektif Sehari-hari yang Terganggu (KES-T).

2. Pelayanan BK di Sekolah

Pelayanan BK merupakan salah satu aspek pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar potensi yang dimilikinya

dapat berkembang secara optimal dalam mencapai masa depan peserta didik. Hal ini sesuai dengan tujuan dari konseling untuk pengembangan KES dan penanganan KES-T dengan fokus pribadi mandiri yang mampu mengendalikan diri yang diselenggarakan melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran (Prayitno, 2013:85).

Kedudukan pelayanan BK di sekolah semakin diperkuat dan dimantapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, khusus Lampiran IV tentang Pedoman Umum Pembelajaran bagian VIII mengenai konsep, komponen, dan strategi layanan BK, serta pihak yang terlibat. Hal ini menjelaskan mengenai arah dan komponen tugas pokok pelayanan BK yang harus direalisasikan di sekolah. Pelayanan BK itu dilaksanakan oleh Guru BK atau Konselor di sekolah terhadap peserta didik sebagai sasaran pelayanan melalui penyelenggaraan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam format tertentu.

Pada Tahun 2014 ketentuan tersebut diperbaharui dengan Permendikbud RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang BK pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pasal 13 menjelaskan bahwa, “Semua ketentuan tentang BK pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam Peraturan Menteri yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini”. Semua hal ini dapat dipahami bahwa materi

tentang BK pada Permendikbud tersebut tidak ada yang bertentangan sehingga masih dapat dipergunakan dan diterapkan.

Berdasarkan peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan BK di sekolah semakin kokoh terutama pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan menteri ini juga sebagai pijakan atau rujukan bagi Guru BK atau Konselor dalam melaksanakan tugas pelayanan BK di sekolah terutama permasalahan jam masuk kelas yang selama ini menjadi perdebatan.

Keberadaan pelayanan BK ditegaskan secara menyeluruh dan kegiatan pelayanan BK perlu dilaksanakan disemua jenis sekolah dalam lingkungan pendidikan dengan harapan untuk menyukseskan pelaksanaan kurikulum tersebut. Pelaksanaan pelayanan BK yang diselenggarakan oleh Guru BK atau Konselor harus mendapat pembinaan dari pengawas BK. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut.

a. Guru BK atau Konselor di Sekolah

Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pemerintah menyatakan bahwa di satuan-satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bertugas tenaga pendidik yang disebut Guru, Guru BK atau Konselor. Guru tentulah pendidik yang bertugas mengampu mata pelajaran, Guru BK adalah Guru yang ditugasi mengampu atau mengelola pelayanan BK, sedangkan Konselor adalah pengampu pelayanan BK yang telah bergelar profesi. Posisi Guru BK atau Konselor dalam PP tersebut jelas, yaitu sebagai pendidik profesional

yang mengampu pelayanan BK di satuan-satuan pendidikan. Guru BK disamakan posisinya dengan Konselor, yaitu memiliki tugas pokok yang sama, mengampu pelayanan BK di satuan pendidikan.

Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang BK menyebutkan bahwa “Tugas pokok Guru BK atau Konselor di satuan pendidikan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut pelayanan BK”. Pelaksanaan peraturan tersebut dapat dirincikan dengan merencanakan dan mengoperasionalkan kegiatan pelayanan BK sehari-hari, baik dalam format klasikal maupun nonklasikal, di dalam dan di luar jam pembelajaran. Pada setiap kelas rombongan belajar peserta didik, dalam waktu 2 jam pembelajaran wajib per minggu, terhadap minimal 150 orang peserta didik yang menjadi subjek ampunan masing-masing Guru BK atau Konselor, sehingga kinerja setiap Guru BK atau Konselor itu dapat terlaksana secara penuh, terprogram, dan teradministrasikan dengan rapi.

Setiap pelaksanaan kegiatan BK (layanan dan kegiatan pendukung) yang semuanya itu merupakan realisasi program harian BK, didahului dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) dan Rencana Kegiatan Pendukung (RKP). Setelah RPL/RKP itu dilaksanakan, dilengkapi langsung dengan Laporan Pelaksanaan Program (LAPELPROG), dan arah rencana kegiatan tindak lanjutnya.

Keberadaan Guru BK atau Konselor dalam Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik. Masing-masing kualifikasi pendidik termasuk Guru BK atau Konselor, memiliki keunikan konteks tugas dan kinerja. Berkenaan dengan hal itu, Permendiknas RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru BK atau Konselor (SKAKK) Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “Untuk dapat diangkat sebagai Guru BK atau Konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi Guru BK atau Konselor yang berlaku secara nasional”.

SKAKK Guru BK atau Konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka berpikir yang menegaskan konteks tugas kerjanya. Permendiknas ini juga menyebutkan yang disebut Konselor adalah Sarjana (S1) BK yang menamatkan program Pendidikan Profesi Konselor (selanjutnya disingkat PPK). Sedangkan Guru BK adalah sarjana yang menamatkan S1 dalam bidang BK.

Ketetapan dalam Undang-undang telah menegaskan bahwa Guru BK atau Konselor adalah pendidik, yang menjadi pijakan dasar bahwa pelayanan BK merupakan pelayanan pendidikan. Sesuai dengan pernyataan itu, UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 6 menegaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Hal ini tentu akan menjadi tonggak legalitas luar biasa berkenaan dengan pengakuan pemerintah. Pengakuan monumental ini lebih menegaskan bahwa Guru BK atau Konselor merupakan tenaga pendidik profesional yang bekerja dalam pelayanan bagi perkembangan manusia seutuhnya.

Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk kegiatan BK menuntut kemampuan dan keahlian tertentu. Apabila kegiatan BK dilaksanakan oleh orang yang bukan ahlinya, maka dalam pelaksanaannya besar kemungkinan tidak tepat, dan dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman terutama dalam menangani masalah peserta didik.

b. Pengawas BK di Sekolah

Menurut Newman (Manullang, 1983:15) pengawasan merupakan salah satu kegiatan manajemen setelah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan. Pelaksanaan setiap fungsi manajemen memerlukan pengawasan yang merupakan proses kegiatan untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dicapai atau dilaksanakan. Melalui pengawasan seorang pengawas dapat melakukan penyempurnaan tugas-tugas,

perbaikan jenis-jenis kegiatan, baik yang telah dilaksanakan seperti yang tercantum dalam perencanaan. Hal yang senada dikemukakan bahwa “*Control is assurance that the performance conform to plan*”. Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Pengawasan di bidang BK diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya. Pengawas sekolah bidang BK adalah pengawas yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta di SLTP/MTs, SMU/SMK/MA, sekolah kedinasan di lingkungan departemen tertentu dalam kegiatan BK. Prayitno (2001:7) menjelaskan bahwa agar kegiatan BK di sekolah berkembang dan terselenggara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka kegiatan tersebut perlu diawasi dan dibina. Dalam pembinaannya melibatkan interaksi yang dinamis antara Guru BK atau Konselor dengan pengawas BK.

3. Kondisi Lapangan

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di SLTA Kota Pariaman karena Pengawas BK di sana berlatar belakang pendidikan S1 Non BK. Peneliti tertarik untuk mengungkap bagaimana bentuk pengawasan yang

terlaksana kepada Guru BK atau Konselor di SLTA Kota Pariaman dengan Pengawas BK yang kualifikasi pendidikannya bukan dari S2 BK.

Sejatinya Pengawas BK dituntut memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang BK. Keterampilan dan kemampuan yang dikuasai merupakan bagian dalam diri dan perilaku yang harus dilatih agar bermakna dan bermanfaat. Komponen yang harus dipenuhi agar pelayanan BK berjalan sebagaimana seharusnya maka Pengawas BK wajib memiliki pemahaman dan mampu mengupayakan pengembangan kompetensi profesional pada tugas, fungsi serta tanggung jawab pada profesinya.

Berdasarkan observasi peneliti di beberapa SLTA Negeri Kota Pariaman pada tanggal 15-20 Juli 2014 masih ada Guru BK atau Konselor yang kurang paham akan tugas pokoknya sebagai Guru BK atau Konselor sekolah, kurang mengerti mengenai kompetensi standar yang harus dimiliki. Di samping itu, masih ada Guru BK atau Konselor yang bingung terhadap pelayanan yang harus diberikan setiap minggunya, memberikan pelayanan tanpa program kerja yang jelas dan tanpa analisis kebutuhan peserta didik. Hal ini terjadi karena kurangnya kualitas pengawasan yang terlaksana selama ini. Pengawas jarang memberikan bimbingan, arahan, contoh kepada Guru BK atau Konselor terkait dengan pelaksanaan pelayanan BK di sekolah.

Selanjutnya, pelayanan belum terlaksana dengan baik, seperti realisasi masuk kelas 2 jam pelajaran perminggu, namun yang terlaksana

hanya 1 jam pelajaran perminggu setiap kelas. Pengadministrasian kegiatan BK sebagai bukti fisik juga masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari kurang lengkapnya instrumentasi BK seperti AUM Umum maupun PTSDL dan juga perangkat komputer serta kemampuan untuk mengolah AUM tersebut. Penyusunan program layanan dan kegiatan pendukung serta pelaksanaannya terlihat belum benar-benar berdasarkan kebutuhan peserta didik. Bentuk penilaian layanan juga terlihat hanya diberikan ketika ujian mid semester dan ujian akhir semester bukan pada setiap memberikan pelayanan. Hal ini juga dapat terjadi karena Pengawas BK sendiri kurang mengerti atau tidak paham tentang substansi BK yang harus diterapkan kepada Guru BK atau Konselor di sekolah.

Senada dengan fenomena tersebut, pada data buku tamu di sekolah yang dimaksud, Pengawas BK datang ke sekolah binaan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Sementara realisasi yang seharusnya berdasarkan Depdiknas Nomor 29 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan tugas guru dan pengawas disebutkan bahwa ekuivalensi kegiatan kerja pengawas BK terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina di satu atau beberapa sekolah pada jenjang pendidikan yang sama atau jenjang pendidikan yang berbeda.

Beberapa fenomena di atas menunjukkan bahwa kinerja Pengawas BK belum menggambarkan yang seharusnya, secara umum

kinerja Pengawas BK masih pada kategori sedikit terlaksana, belum menunjukkan standar yang seyogyanya dilakukan di sekolah binaan. Kenyataan semacam ini juga menjadi indikator bahwa pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK belum optimal.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang masih bersifat sementara, terlihat bahwa pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK masih perlu ditingkatkan. Maka dalam meningkatkan kinerja Pengawas BK perlu dilakukan penelitian untuk mengungkap apa permasalahan yang sebenarnya terjadi. Hal tersebut merupakan dasar dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan berbagai hal tentang tugas pokok Pengawas BK dengan judul “Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas Bimbingan dan Konseling dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling Sekolah Lanjutan Tingkat Atas” (Studi di Kota Pariaman Sumatera Barat).

B. Masalah Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi lapangan yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang perlu diteliti, yaitu pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK terhadap kegiatan Guru BK atau Konselor di sekolah, yang meliputi:

- a. Kualitas komponen pemantauan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor di sekolah.

- b. Kualitas komponen penilaian oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor di sekolah.
- c. Kualitas komponen pembinaan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor di sekolah.
- d. Kualitas pembinaan profesionalitas Pengawas BK oleh Dinas Pendidikan.
- e. Kualitas pengembangan keprofesionalan Guru BK atau Konselor di sekolah.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah penelitian dalam pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK terhadap kegiatan Guru BK atau Konselor di sekolah, meliputi:

- a. Kualitas komponen pemantauan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor di sekolah.
- b. Kualitas komponen penilaian oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor di sekolah.
- c. Kualitas komponen pembinaan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor di sekolah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian dalam pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK terhadap kegiatan Guru BK atau Konselor di sekolah, meliputi:

- a. Bagaimana kualitas komponen pemantauan yang dilaksanakan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor di sekolah?
- b. Bagaimana kualitas komponen penilaian yang dilaksanakan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor di sekolah?
- c. Bagaimana kualitas komponen pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor di sekolah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK terhadap kegiatan Guru BK atau Konselor di sekolah untuk mengungkapkan:

- a. Kualitas komponen pemantauan yang dilaksanakan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor di sekolah.
- b. Kualitas komponen penilaian yang dilaksanakan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor di sekolah.
- c. Kualitas komponen pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor di sekolah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis
 - 1) Temuan tentang kualitas komponen pemantauan yang dilaksanakan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor dalam pelayanan BK di sekolah bermanfaat agar proses pelaksanaan

pengawasan lebih terarah dan tepat sasaran sehingga kinerja Guru BK atau Konselor dapat berjalan lebih maksimal.

- 2) Temuan tentang kualitas komponen penilaian yang dilaksanakan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor dalam pelayanan BK di sekolah bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelaksanaan pelayanan BK di sekolah.
- 3) Temuan tentang kualitas komponen pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengawas BK terhadap kinerja Guru BK atau Konselor bermanfaat untuk memperbaiki kinerja agar lebih baik dan meningkatkan wawasan serta pemahaman Guru BK atau Konselor di sekolah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sekolah, sebagai masukan dalam memberdayakan Guru BK atau Konselor, berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Pengawas BK di sekolah.
- 2) Guru BK atau Konselor, sebagai bahan masukan, evaluasi diri, dan pertimbangan dalam melaksanakan pelayanan BK di sekolah
- 3) Pengawas, sebagai bahan evaluasi kinerja dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok sebagai Pengawas BK.
- 4) Peneliti, sebagai tongkat estafet pengembangan ilmu BK dan syarat untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan (M.Pd)